

PERSPEKTIF KELOMPOK ISLAM TENTANG KERUKUNAN BERAGAMA DI KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Ali Saputra

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72, Makassar
Email: alecbalitbang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan perspektif kerukunan menurut kelompok Islam, dalam hal ini adalah kelompok Darul Ilmi Samarinda dan FPI (Front Pembela Islam) Samarinda/Kalimantan Timur. Selain mengungkap perspektif kerukunan kelompok tersebut, juga mengetahui praktek kerukunan kelompok Islam di sana. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan wawancara dan observasi sebagai instrumen pengumpul data utamanya. Hasilnya, bahwa perspektif kerukunan kelompok Islam salafi di Samarinda masih cenderung konservatif, masih ada batasan-batasan dalam interaksi antara muslim dan non muslim. Selain itu, kelompok ini cenderung memandang kelompok-kelompok seperti Syiah sebagai kelompok yang lebih berbahaya terhadap Islam dibandingkan dengan non muslim. Perspektif serupa juga dianut oleh kelompok FPI setempat. Namun, dalam beberapa isu, bersilang dengan salafi. Sementara pada tingkat praktek, hanya kelompok Islam moderat saja yang terlibat aktif dalam kegiatan perayaan kerukunan, sedangkan kelompok Islam salafi maupun FPI menghindarinya. Untuk itu, perlu dilakukan dialog yang lebih intensif dengan kelompok konservatif ini untuk merangkul mereka.

Kata kunci: Perspektif, kerukunan beragama, salafi

Pluralitas dalam kehidupan berbangsa merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan di Indonesia. Namun, pluralitas juga dapat menjadi malapetaka yang dapat meruntuhkan eksistensi bangsa-bangsa seperti yang telah menimpa negara Uni Soviet dan Yugoslavia yang telah lenyap dan terpecah-pecah akibat dari pergolakan dan peperangan yang muncul antara berbagai kelompok-kelompok etnis/bangsa yang ada di dalam kedua negara tersebut. Perpecahan yang mengarah kepada disintegrasi dikarenakan pluralitas dalam suatu bangsa tidak dikelola dengan baik, tapi dibiarkan berkembang secara liar. Kerukunan menjadi kata salah satu kata

kunci dalam mengelola pluralitas suatu bangsa demi mempertahankan eksistensi dan integrasinya.

Dalam konteks Indonesia, yang dihuni oleh beragam warga yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda, maka menciptakan kerukunan, kerukunan antar umat beragama merupakan hal krusial karena, seperti dikatakan Walzer (1997), keragaman membuat kerukunan menjadi penting dan, melalui kerukunan, keragaman menjadi mungkin. Akhir-akhir ini, meskipun hasil riset sejumlah lembaga penelitian masih menempatkan kerukunan beragama di Indonesiadalam status baik, seperti riset

Wahid Institute (2016) yang menyatakan bahwa muslim di Indonesia masih toleran. Temuan ini serupa dengan temuan dari riset INFID (2016) tentang persepsi generasi muda terhadap radikalisme yang menunjukkan masih adanya toleransi mereka terhadap perbedaan keyakinan.

Namun, baik Wahid Institute maupun INFID masih memberikan catatan tentang masih adanya potensi intoleransi dan munculnya aksi radikalisme di sejumlah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makassar (2011, 2012, 2013) menemukan bahwa, meski Indeks Kerukunan Beragama (di wilayah Kawasan Timur Indonesia) berada pada kategori tinggi, namun kerukunan beragama hanya menunjukkan gejala kerukunan pasif. Misalnya, penelitian Syamsurijal (2012) di Sulawesi Utara menemukan bahwa gejala kerukunan beragama masih berjalan di permukaan, demikian pula dominasi pemeluk agama mayoritas terhadap minoritas masih terlihat.

Wilayah Kalimantan Timur, yang masyarakatnya bersifat heterogen dan multi etnis, menurut riset Wahid Institute (2014) dimasukkan ke dalam kategori zona oranye. Zona oranye berarti intensitas peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama secara kuantitatif sedang, namun dengan aktor pelanggar dan potential *offender* yang ada di wilayah tersebut cukup terorganisasi, kebijakan pemerintah daerah restriktif, dan potensi sosio kultur serta kelompok-kelompok toleran masih berfungsi cukup baik. Menurut lembaga tersebut, indikatornya antara lain pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Samarinda tahun 2011, penolakan pendirian Gereja Toraja di Samarinda tahun 2008, penolakan kedatangan Habib Rizieq di Samarinda tahun 2014. Belum lagi kasus peledakan

Gereja Oikumene di Samarinda tahun 2017 dan demo anti FPI di Samarinda di tahun yang sama. Untuk itu, perlu kiranya melacak perspektif kerukunan dari sejumlah kelompok-kelompok agama, khususnya dalam Islam adalah kelompok yang dipandang berkarakter puritanisme berhaluan radikal sebagai langkah awal untuk menyelami beberapa peristiwa/ketegangan yang terkait dalam kehidupan umat beragama di Kota Samarinda.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif kerukunan dari kelompok Islam di Kota Samarinda?
2. Bagaimana praktik kerukunan beragama dan berbagai kelompok Islam di Kota Samarinda?
3. Bagaimana Perspektif Kerukunan kelompok keagamaan dalam konteks sosial, budaya dan politik di Kota Samarinda?

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan perspektif kerukunan kerukunan dari kelompok Islam di Kota Samarinda
2. Menggambarkan praktik-praktik kerukunan umat beragama kelompok Islam di Kota Samarinda
3. Menggambarkan Perspektif Kerukunan kelompok keagamaan dalam konteks sosial, budaya dan politik di Kota Samarinda

Penelitian ini mengungkap perspektif dan praktik kerukunan beragama dari kelompok Islam, dalam hal ini adalah kelompok Islam salafi/wahabi/fundamentalis di Kota Samarinda, dalam hal ini adalah Yayasan Darul Ilmi (Ponpes Ibnul Mubarak), Samarinda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data digali melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh yang dipilih (*purposive sampling*). Ada tiga bentuk informan dalam konteks ini. Pertama, pejabat Kemenag, Kesbang, dan Pemda ataupun kalangan akademisi tentang kebijakan dan konsep persoalan kerukunan. Kedua, Tokoh-tokoh dari kelompok agama terkait. Ketiga, jemaah kelompok tersebut. Proses wawancara dipandu dengan instrumen panduan umum wawancara.

Selain wawancara, data juga dikumpulkan dengan cara:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan tentang praktek-praktek kerukunan yang dilakukan oleh kelompok agama yang dikaji.
2. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen terkait dengan kerukunan kelompok agama yang dikaji, baik dalam bentuk naskah, manuskrip, maupun kitab yang menjadi rujukan dalam memahami keragaman serta mengelola kerukunan kelompok agama terkait.

Penelitian ini berlokasi di Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif. Deskripsi data dilakukan secara etik dan emik. Proses penyajian data dipilah dengan mendeskripsikan lebih dahulu data-data emik lalu dilanjutkan dengan analisis secara etik. Namun sebelumnya, data direduksi lebih dulu lalu dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.

Kerukunan umat beragama lebih dikenal dengan istilah trilogi Kerukunan Umat Beragama, yaitu Kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Kerukunan Umat Beragama

dengan Pemerintah. Kerukunan Intern Umat Beragama adalah hubungan yang damai dan saling menghormati kelompok-kelompok yang ada dalam satu agama, seperti kelompok NU dengan Muhammadiyah. Kerukunan Antar Umat Beragama adalah hubungan yang damai dan saling menghormati antara sesama pemeluk agama yang berbeda. Adapun Kerukunan Umat Beragama dan pemerintah adalah hubungan yang harmonis antara pemeluk agama dengan pemerintah, khususnya dalam menjalankan aturan yang dibuat pemerintah dalam mengatur hubungan antar umat beragama. (Mawardi Hatta, 1981).

Agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia berjalan dengan harmonis, terdapat sejumlah regulasi yang menjamin kebebasan beragama, yang tertinggi adalah UUD 1945 pada Pasal 29, utamanya ayat 2, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan serta meyakini agama dan kepercayaan tersebut. Terkait kepentingan masing-masing agama di Indonesia yang memiliki misi dakwah dan penyebaran maka dibuat aturan teknis penyiaran agama dalam bentuk SK Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang tata cara penyiaran agama dan bantuan luar negeri terhadap lembaga swasta untuk kegiatan keagamaan. Begitu pula, perayaan hari-hari besar agama diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. MA/432. 1981. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya konflik antar agama di Indonesia. Aturan yang lebih baru adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Mendagri dan Menag No 8 dan 9 Tahun 2006 yang menjelaskan Kerukunan Umat Beragama sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling

pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Aturan ini juga mengatur secara teknis tata cara pendian rumah ibadah dan bagaimana peran tokoh-tokoh agama dalam merawat keagamaan.

Selain tiga konsep kerukunan di atas, terdapat juga beberapa model kerukunan yang lain. Model kerukunan tersebut antara lain: Pertama: inklusivisme. Model ini memandang bahwa kebenaran bukan hanya kelompoknya sendiri, karena itu mereka terbuka untuk berdialog dengan kelompok bahkan agama yang berbeda. Dalam konteks inklusivisme, tafsir keagamaan yang bersifat skripturalis-literalis diubah menjadi rasionalis kontinyu. Ini seperti dinyatakan Maimundo Panikkar, agar tafsir bisa memiliki relevansi dengan yang lain yang berbeda sekaligus bisa pula diterima oleh pihak lain. Pandangan ini mustahil terbangun dari sikap ortodoksi terhadap ajaran agama. Pandangan inklusivisme ini muncul di semua agama. Ditulis oleh Franz Magnis Suseno (2005), Konsili Vatikan II mengakui ada keselamatan di luar gereja. Menurutnya, orang yang tidak dibaptis, tanpa kesalahan tidak percaya kepada Allah tapi berjalan sesuai hati nuraninya dapat diselamatkan. Kedua, setiap orang berhak mengikuti agama yang diyakininya. Ketiga, umat Katolik dianjurkan untuk mengikuti apa yang baik dalam agama-agama lain.

Paradigma kerukunan lainnya adalah toleransi. Toleransi, dari kata *tolerantia*, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keinginan, dan kesabaran. Walzer (1997) menyebutkan setidaknya ada lima matra toleransi, yaitu: (1) menerima perbedaan

untuk hidup damai, (2) menjadikan keseragaman menjadi perbedaan, (3) menerima bahwa orang lain memiliki hak, (4) mengekspresikan keterbukaan terhadap orang lain, ingin tahu, menghargai, ingin mendengarkan dan belajar dari yang lain, dan (5) dukungan yang penuh terhadap perbedaan dan menekankan aspek otonomi. Dalam konteks Indonesia, toleransi dikembangkan oleh Orde Baru. Namun, yang dibangun adalah toleransi yang berkepentingan kekuasaan. Memang masa itu tidak terjadi konflik atas nama perbedaan, namun dipaksakan atas nama stabilitas. Pemerintah menguasai yang mayoritas dan menundukkan yang minoritas. Toleransi demikian hanya berjalan di permukaan.

Toleransi dapat dibedakan menjadi dua: pasif dan aktif. Toleransi pasif adalah sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan manusia. Perbedaan diterima sebagai suatu fakta. Toleransi ini dikenal sebagai inklusif. Adapun toleransi aktif tidak sekedar menerima kenyataan dari keragaman yang ada, tapi juga terlibat dalam keragaman tersebut. Toleransi semacam ini memungkinkan penganut agama yang berbeda untuk berdialog secara aktif dan bekerjasama dalam berbagai bidang.

Paradigma kerukunan yang ketiga adalah pluralisme, yang merupakan perkembangan dari inklusivisme. Kalau inklusivisme meyakini adanya kesamaan substansial pada yang lain, maka pluralisme meyakini adanya perbedaan-perbedaan. Lanjut, pluralisme bahkan membangun kemungkinan kerjasama dalam perbedaan tersebut. Syarat terbangunnya adalah terbukanya pemahaman yang konstruktif terhadap perbedaan. Menurut Diana L Eck (2007), ada tiga hal terkait dengan pluralisme ini. Pertama, keterlibatan aktif di

tengah keragaman dan perbedaan. Kedua, upaya untuk memahami yang lain yang berbeda dengan pemahaman yang konstruktif. Upaya menemukan komitmen bersama ditengah berbagai komitmen.

Masih terkait dengan keragaman adalah multikulturalisme. Tidak hanya terkait dengan keragaman agama, multikulturalisme juga menaruh minat pada keragaman budaya dan identitas maupun persoalan-persoalan minoritas. Kymlica (2003) memandang multikulturalisme mencakup hal-hal yang bersifat etnisitas dan bangsa. Multikulturalisme, menurut Stuart Hall (dalam Robert & Tobi, 2014) dibedakan dari multikultur. Manakala multikultur bermakna pembedaan dan keragaman dalam budaya, maka multikulturalisme adalah kebijakan yang diambil terkait dengan pengelolaan keragaman budaya yang ada.

Terkait dengan persoalan perspektif kerukunan, pada umumnya penelitian yang sudah ada mengangkat perspektif kerukunan menurut masing-masing agama secara umum. Penelitian yang menggali kerukunan dalam perspektif kelompok-kelompok agama belum banyak dilakukan. Namun ada beberapa tulisan yang punya pertalian dengan penelitian ini antara lain:

Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian, tulisan Zuhairi Misrawi terbitan Kompas Tahun 2010. Tulisan ini memandang toleransi sebagai sebuah nilai dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Ia juga menggambarkan bagaimana perspektif toleransi salah satu kelompok Islam moderat di Indonesia, yaitu NU.

Artikel "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Umat Beragama", tulisan Toto Suryana dalam Jurnal Pendidikan Islam, Ta'lim Vol.9 No.2 /2011. Dalam artikelnya,

penulis hanya menggambarkan perspektif kerukunan dalam Islam secara umum. Menurutnya, ada tiga konsep hubungan dengan sesama manusia, yaitu *Ukhuwwah Islamiyyah* (Persaudaraan atas dasar agama), *Ukhuwwah Wathaniyyah* (Persaudaraan atas nama kesamaan bangsa) dan *Ukhuwwah Insaniyyah* (Persaudaraan atas dasar kemanusiaan).

Tulisan Umi Sambullah (2015), Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama dalam perspektif elit agama Kota Malang. Penulis, meski mengulas pandangan sejumlah elit/tokoh agama setempat tentang pluralisme dan kerukunan beragama, namun tanpa mendalami pandangan tiap-tiap kelompok, aliran, dan sekte yang ada di tiap-tiap agama tersebut.

Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan (2012). Sebuah karya Mohamed Fathi Osman membincang toleransi dalam Islam. Mula-mula si penulis menggambarkan pluralisme di era modern, dilanjutkan dengan menjelaskan pluralisme dalam peradaban Islam. Namun, penggambaran pluralisme dalam Islam hanya digambarkan secara umum.

Penelitian Indeks Kerukunan Beragama oleh Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2011, 2012, dan 2013 di Prov. Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat menunjukkan temuan Indeks Kerukunan yang cukup baik, namun berada pada tataran toleransi pasif.

Penelitian Islamisme di Kalangan Muda Terdidik oleh Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar tahun 2016 mengungkap tumbuhnya paham-paham radikal serta penurunan sikap toleransi di kalangan siswa terdidik Kota Makassar.

Penelitian Dinamika Aliran-Aliran dalam Islam di Kota Makassar oleh Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2017 menemukan adanya kecenderungan kelompok-kelompok baru Islam di Makassar yang bisa menoleransi agama lain sejauh mengikuti aturan mayoritas, namun sebaliknya sangat resistan terhadap kelompok Islam lain yang dipandang oleh mereka sebagai berbeda dengan yang mainstream.

Keempat tulisan pertama penelitian di atas masih menggambarkan kerukunan dari sudut pandang agama-agama secara umum, dan belum menelisik perspektif kerukunan dalam kelompok-kelompok dalam tiap-tiap agama tersebut. Sedangkan ketiga penelitian terakhir lebih banyak menggambarkan sikap kerukunan pemeluk agama secara umum. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap perspektif kerukunan kelompok-kelompok agama, dalam hal ini adalah kelompok-kelompok Islam di Kota Samarinda, menemukan persoalan dan model kerukunan yang berjalan di sana. Adapun kelompok yang dipilih adalah kelompok salafiyah Yayasan Darul Ilmi Samarinda (Pesantren Ibnul Mubarak) dan FPI Samarinda. Kedua kelompok ini merupakan representasi dari kelompok salafi dan fundamentalis/radikal.

Perspektif Kerukunan

Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang memiliki konstruksi masyarakat yang multikultural, terbagi ke dalam komposisi multi agama maupun multi etnis. Secara umum, hubungan yang terjalin antar etnis maupun agama di kalangan warga Kota Samarinda berjalan secara harmonis. Hal ini tak lepas juga dari peran Pemerintah Daerah setempat yang berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan

di kalangan warganya, dengan tersedianya forum-forum yang konsen terhadap hal persatuan dan kerukunan di wilayah tersebut. Setidaknya di Kota Samarinda terdapat tujuh forum demikian. Forum-forum tersebut antara lain FKPMKT, FKDM, FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan, MUI, Forum Koordinasi Pencegahan Teroris, dan Forum Komunikasi Pengusaha. Semua forum tersebut berada di bawah payung Forum Kebangsaan yang diketuai oleh Bapak H. Yos Soetomo, seorang pengusaha terkemuka di Kota Samarinda dan Kaltim pada umumnya. Namun, beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir seperti yang disebutkan terdahulu memunculkan kembali pertanyaan terkait seberapa kuat bangunan kerukunan beragama yang telah terbangun di sana. Di samping kelompok-kelompok Islam yang berhaluan moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, di Samarinda juga sudah mulai bermunculan kelompok-kelompok yang menganut ideologi puritan dan cenderung radikal, umumnya dikenal sebagai kelompok Salafiyah khususnya pasca reformasi. Bahkan, menurut seorang pejabat di Kanwil Kemenag Kaltim, disinyalir adanya NII (Negara Islam Indonesia), salah satu gerakan Islam radikal yang bercita-cita membentuk negara Islam di Indonesia, yang bergerak di bawah tanah. Ini dikonfirmasi oleh seorang mantan pengikut NII (inisial S) di Kota Samarinda yang telah sadar dari pengaruh NII. Kelompok-kelompok salafi ini seringkali dikaitkan dengan sikap dan aksi intoleransi di Indonesia, seringkali mengutuk praktek-praktek keagamaan kelompok Islam di luar mereka. Ciri-ciri dari pengikut kelompok puritanisme Islam yang umumnya menjadi stereotip adalah memakai jubah, berjanggut, mengklaim kelompoknya yang paling benar dan sering menyindir dan

mengutuk praktek-praktek keagamaan Islam moderat maupun tradisional. Bahkan, terhadap kelompok Islam tertentu, sikap mereka lebih keras dibandingkan sikapnya terhadap kelompok non muslim. Ada beberapa kelompok Islam di Kota Samarinda yang berhaluan puritan/radikal ini. Dua diantaranya adalah:

Yayasan Darul Ilmi Samarinda

Setelah mendapatkan informasi dari seorang pejabat di Kanwil Kemenag Kaltim tentang adanya kelompok Islam radikal yang bermarkas di Gunung Lingai Samarinda, peneliti mendatangi kelompok tersebut yang ternyata adalah pondok pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ilmi Samarinda. Yayasan Darul Ilmi Samarinda merupakan salah satu yayasan salafi di Kota Samarinda dan mengelola sebuah pondok pesantren bernama Ponpes Ibnu Mubarak. Lokasinya berada di Kec. Sungai Pinang dan letaknya agak terpencil, jauh dari jalan poros. Sebelumnya, yayasan yang mulai berdiri sejak tahun 2017 ini merupakan bagian dari Yayasan Assalaf yang berdiri pada tahun 2004-2005 dan menaungi Pesantren Ibnu Qayyim Balikpapan. Karena intensitas kesibukan yang tinggi dalam bidang pendidikan di samping banyaknya aset yang dimiliki di Kota Samarinda, maka dibentuklah Yayasan Darul Ilmi sebagai pemekaran dari Yayasan Assalaf di Balikpapan. Saat peneliti menanyakan tentang adanya dugaan bahwa Pesantren Ibnu Mubarak adalah kelompok radikal, Ustadz Ali Surachman, pimpinan pondok menyatakan bahwa pesantren mereka adalah pesantren yang berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah. Peneliti sempat melihat sekelompok wanita yang mengenakan cadar di sekitar pesantren. Ustadz yang sempat mengenyam pendidikan di sejumlah pesantren di beberapa provinsi,

termasuk di Pesantren Ibnu Qayyim Balikpapan ini menyebutkan bahwa kegiatan mereka tidak sebatas pengajaran agama di pesantren saja, tapi juga melakukan pengajian keagamaan rutin di sejumlah masjid bagi para warga di Kota Samarinda dan dilakukan secara terjadwal setiap minggunya. Masjid-masjid tersebut adalah Masjid Arrahmat, Masjid AsSa'adah Palaran, dan Masjid Asy Syifa. Kegiatan pengajian tersebut berupa pengkajian kitab-kitab klasik sebagai rujukan. Untuk pengkajian bidang aqidah, digunakan Kitab *al-Aqidah al-Wasathiyyah* karangan Ibnu Taimiyyah, seorang tokoh mazhab hambali dan Kitab *Masail-al-Jahiliyyah* karya Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang tokoh Wahabi.

Terkait dengan pandangan-pandangan tentang kerukunan, ustadz Ali menyatakan bahwa jalan keselamatan hanya dapat dicapai melalui dua cara: pertama, dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis, dan kedua, dengan memahami kedua sumber hukum Islam tersebut sesuai dengan pemahaman generasi-generasi awal Islam (atau generasi salaf). Mereka ini adalah para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it-tabi'in* yang mengikuti mereka dengan baik. Semua persoalan-persoalan yang muncul belakangan diselesaikan dengan merujuk kepada mereka. Terkait dengan kelompok-kelompok Islam yang berkembang di Indonesia, maka kelompok tersebut ada yang kafir dan ada yang tidak. Kelompok Islam yang digolongkan sebagai kelompok kafir adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah dianggap kafir karena mereka dianggap telah mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Kelompok Syiah diyakini berpotensi merusak negara-negara Islam di seluruh dunia karena adanya taqiyyah, yaitu menyembunyikan identitas diri untuk

mengelabui kelompok Islam non syiah demi mengamankan identitas sendiri. Kasus perang di Yaman, menurut Ustadz Ali akibat dari sistem taqiyyah kelompok syiah yang didukung Iran. Selain Syiah, kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang mengakui memiliki nabi sendiri seperti Ahmadiyah juga dianggap kafir. Uniknya, kelompok-kelompok seperti khawarij, teroris, dan alqa'idah maupun ISIS tidak dianggap kafir, karena prinsip keimanan mereka dianggap belum merusak prinsip islam/rukun iman. Terhadap kelompok-kelompok Islam yang dipandang kafir, seperti Syiah, maka jika mereka misalnya adalah tetangga, maka diberikan peringatan kepada para tetangga lain untuk tidak bergabung dengan mereka. Hal tersebut juga berlaku bagi kelompok-kelompok seperti ISIS dan teroris. Namun penetapan status hukum atas kelompok-kelompok tersebut harus mengikuti garis yang ditetapkan oleh ulama fatwa, dari lokal hingga ke Saudi, seperti Syekh Saleh bin Utsaimin. Adapun tradisi-tradisi lokal, seperti sedekah laut yang biasa dilakukan oleh masyarakat tradisional di beberapa daerah di Indonesia, merupakan hal syirik. Beberapa tradisi masyarakat Islam yang berkembang setelah masa Nabi SAW, seperti membaca barzanji, harus diingkari jika itu mengatasnamakan agama.

Dalam relasinya dengan warga non muslim, sepanjang mereka dianggap tidak mengganggu Islam, maka keberadaan mereka harus dihormati. Misalnya, jika warga non muslim tersebut tidak melakukan hal-hal seperti menarik jilbab/hijab wanita muslim. Demikian pula, warga non muslim tersebut seyogyanya tidak membangun tempat ibadahnya di lingkungan yang warganya mayoritas muslim. Kelompok non muslim demikian, jika dibiarkan berbuat demikian, akan membangun tempat

ibadahnya yang lebih besar/megah. Relasi dengan warga non muslim haruslah berpatokan pada prinsip "Bagimu Agamamu dan Bagiku Agamaku". Menurut pandangan ustadz Ali, sikap mayoritas muslim terhadap minoritas non muslim di wilayahnya sangat berbeda/lebih baik dibandingkan sikap mayoritas non muslim terhadap minoritas muslim di wilayahnya. Beliau mencontohkan, pembangunan tempat ibadah warga non muslim di lingkungan mayoritas muslim masih lebih mudah dibandingkan dengan pembangunan tempat ibadah warga muslim di lingkungan mayoritas non muslim. Dalam hal interaksi dengan warga non muslim, berinteraksi/bertransaksi dengan warga Tionghoa, misalnya, masih lebih disukai dibandingkan dengan berinteraksi/bertransaksi dengan warga muslim Syiah. Alasannya, meskipun keduanya sama-sama kafir, tapi orang tionghoa dianggap masih sayang terhadap Islam, sedangkan orang Syiah dianggap paling benci terhadap Islam. Orang Syiah dianggap mengklaim sebagai yang paling benar, sedangkan di diluar mereka dianggap kafir. Mereka dicurigai mempunyai agenda mengubah ideologi semua negara Islam menjadi berideologi Syiah. Lanjut, warga non muslim yang tinggal di lingkungan mayoritas muslim memiliki hak untuk merayakan hari rayanya sepanjang itu dilakukan di rumahnya. Namun, warga muslim tidak boleh berpartisipasi dalam perayaan hari raya non muslim, bahkan untuk sekadar memberikan ucapan selamat.

Salah satu pandangan unik kelompok ini, tidak membenarkan kelompok Islam yang mencoba membangun sistem khilafah. Menurutnya, umat Islam harus menerima siapapun yang berkuasa di negaranya, baik itu penguasanya dipilih melalui pemilihan umum maupun melalui penggulingan

kekuasaan, baik itu muslim maupun non muslim. Sistem khilafah ditolak karena dianggap diadopsi oleh para teroris dan kelompok ISIS. Kelompok salafiah Darul Ilmi Samarinda juga tidak mau terlibat terhadap tindakan-tindakan razia dan demo yang dilakukan oleh kelompok FPI. Mereka mengaku tidak terlibat dalam kegiatan demo besar-besaran umat Islam di Jakarta (demo 212) beberapa waktu lalu. Tindakan demo besar-besaran Islam demikian dipandang menyalahi prinsip kelompok salafi ini, yaitu menerima dan mematuhi pemimpin.

Tindakan-tindakan sejumlah kelompok Islam yang suka main hakim sendiri dengan menyegel tempat-tempat ibadah non muslim di wilayahnya yang pembangunannya dianggap bermasalah ataupun menyerang tempat-tempat hiburan malam tidak dibenarkan, karena tindakan yang benar harus melalui prosedur hukum yang berlaku resmi.

Dalam hal relasi dengan umat non muslim melalui perkawinan, Ustadz Ali menyatakan pernikahan beda agama dibolehkan dalam Islam, tentunya dengan memenuhi dua syarat. Syarat pertama, pernikahan orang muslim itu dilakukan dengan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Syarat kedua, mempelai muslim mampu untuk membawa pasangannya menjadi muslim kelak.

Kelompok Salafiyah Darul Ilmi sangat selektif dalam mengundang tokoh-tokoh Islam untuk berceramah di tempat mereka. Bahkan tokoh-tokoh Islam dari MUI tidak pernah mereka undang sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan *daurah* yang biasa diadakan di Islamic Center Samarinda. Justru yang diundang, selain dari internal sendiri, adalah dari TNI (Kodim). Adapun Tokoh agama non muslim tidak

pernah mereka undang dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok tersebut.

Mengikuti perayaan hari-hari besar agama non muslim oleh orang Islam tidak dibenarkan, namun juga tidak bisa dipaksakan untuk tidak mengikuti bagi orang Islam yang mau mengikutinya. Tak sebatas perayaan hari-hari besar agama, menurut Ustadz Ali, bahkan mengikuti undangan menghadiri pernikahan orang non muslim juga tidak dibolehkan, meskipun tempatnya bukan di gereja, karena prosesi pernikahan dianggap sebagai bagian dari agama. Sehingga, menghadiri acara pernikahan orang non muslim tersebut sama saja dengan membenarkan agamanya. Terkecuali jika menghadiri undangan dari orang non muslim dalam acara-acara yang tidak berkaitan dengan agamanya, seperti undangan makan bersama, maka itu dibolehkan, sepanjang yang mengundang sudah dikenal baik. Dicontohkannya, Rasulullah SAW pernah menghadiri undangan makan dari orang yahudi dan menyantap sajiannya. Jika kami mengadakan kurban, kata Ustadz Ali, kami malah juga menghadiahkan daging kurban kami kepada orang non muslim.

Forum Pembela Islam (FPI) Samarinda

Salah satu kelompok Islam yang paling sering disorot di sejumlah media massa sebagai kelompok yang tidak toleran adalah Front Pembela Islam (FPI). Kelompok Islam yang pertama kali dideklarasikan pada tahun 1998 ini seringkali dituding sebagai kelompok yang suka melakukan tindakan-tindakan intoleransi anti kerukunan, seperti razia terhadap tempat-tempat hiburan malam yang dituding sebagai sarana maksiat, razia selama bulan puasa, penyegelan tempat-tempat ibadah non muslim yang dianggap “bermasalah”, dan terbaru, adalah mobilisasi

massa untuk aksi besar-besaran demo 212 di Jakarta yang menuntut pengadilan terhadap Gubernur Jakarta (saat itu), Basuki Purnama atau Ahok yang non muslim dengan tuduhan penistaan agama (Islam). Semua aksi tersebut oleh pimpinan FPI dilakukan dengan dalih sebagai pembelaan terhadap Islam.

Adanya aksi-aksi tersebut membuat citra FPI menjadi negatif di mata masyarakat yang pada gilirannya mendapatkan aksi balasan berupa demo penentangan maupun tuntutan pembubaran FPI di beberapa wilayah, seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Khusus di Samarinda, FPI pernah mendapatkan aksi serupa pada awal tahun 2017. Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pancasila melakukan aksi massa (25/1/2017) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur menolak FPI. Adanya isu akan penyerangan terhadap sekretariat FPI Kaltim membuat kelompok pendukung FPI berkumpul di depan sekretariat FPI. Meskipun belakangan aksi-aksi semacam ini mulai marak, namun seperti diutarakan oleh Ketua FPI Kaltim, Ustadz Didit Ardansyah, situasi kerukunan umat beragama di Kaltim masih cukup baik. Peran dari Pemda setempat maupun berbagai forum-forum kerukunan yang ada di Samarinda disebutkan sebagai faktor yang ikut mempengaruhi situasi kerukunan tersebut. Menyangkut aksi-aksi kontra FPI, beliau menudingnya sebagai “permainan kotor” beberapa elit politik di Jakarta yang tidak menyukai FPI, khususnya dari salah satu partai politik yang dianggap memusuhi FPI, tanpa menyebut namanya.

Terkait dengan isu kerukunan beragama ini, menurut Ustadz Didit, FPI menghormatinya. Namun, beliau menyatakan bahwa kerukunan beragama harus diletakkan dalam konteks “*Lakum*

Diinukum Waliyadin (Bagimu Agamamu dan Bagiku Agamaku)”. Ini berarti bahwa umat Islam tidak boleh mengganggu peribadatan umat non muslim. Terlibat dalam perayaan kegiatan agama lain dianggap sebagai bagian dari mengganggu peribadatannya, sehingga tidak boleh dilakukan. Relasi antar agama telah diatur dalam regulasi, sehingga problem-problem yang muncul dalam isu kerukunan adalah buah dari ketidaktaatan terhadap regulasi yang berlaku. Beliau mencontohkan pembangunan rumah ibadah yang sering dipermasalahkan, karena tidak mengikuti aturan. Di Samarinda, ada rumah atau bangunan umum yang dibangun oleh warga non muslim namun kemudian malah difungsikan sebagai gereja, menyalahi izin pembangunannya. Apabila bangunan tempat peribadatan dibangun sesuai dengan regulasi dan fungsinya, maka FPI tidak mempermasalahkan, seperti gereja-gereja yang sudah lama berdiri. Ustadz Didit menambahkan, justru problem kerukunan banyak ditemui di wilayah yang warga muslimnya minoritas. Di Kutai Barat, misalnya, menurut beliau, pembangunan masjid dipersulit, belum lagi di wilayah-wilayah seperti Papua.

Salah satu hal yang juga dikritik oleh FPI sebagai hal yang merusak kerukunan adalah penggunaan atribut-atribut keagamaan non muslim pada karyawan muslim. Hal seperti ini biasanya terlihat pada masa-masa menjelang natal, dimana sering ditemui banyak karyawan (termasuk karyawan muslim) seperti di pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut natal (topi sinterklas, pohon natal). Meski kelihatan sepele, bagi FPI ini adalah hal mendasar, karena menyangkut persoalan aqidah Islam. FPI mengancam akan mempidanakan pengusaha/kelompok usaha

yang memaksakan penggunaan atribut-atribut keagamaan non muslim bagi karyawannya yang muslim jelang hari raya tertentu, seperti natal dan tahun baru. Penggunaan atribut-atribut semacam itu pada event keagamaan/hari raya tertentu juga dipandang sebagai bentuk perayaan terhadap hari raya agama tersebut, dan hal ini harus dihindari oleh umat Islam. Termasuk hal semacam ini adalah terlibat dalam kegiatan pengamanan perayaan agama non muslim. Oleh karena itu, lanjut Ustadz Didit, berbeda dengan kelompok GP Ansor NU, FPI di Samarinda tidak pernah diminta untuk terlibat dalam kegiatan pengamanan perayaan hari raya agama tertentu, seperti natal.

Menyangkut kepemimpinan, FPI menganggap idealnya pemimpin di Indonesia adalah yang beragama Islam. Namun, manakala hasil politik menunjukkan realitas yang berbeda, FPI tidak memaksakan pilihan, tapi menyerahkan pilihan kepada masing-masing anggota. Khusus di Samarinda dan Kaltim, FPI sudah menyatakan dukungan dan aliansi kepada calon Gubernur/Wagub yang didukung oleh tiga parpol, yaitu PAN, PKS, dan Gerindra. Ketiga partai tersebut dianggap oleh FPI sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan Islam, hal tersebut terlihat oleh sikap oposisi ketiganya terhadap kepemimpinan Ahok selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh FPI Pusat, dan diikuti oleh FPI di bawahnya.

Menyangkut relasi dengan kelompok-kelompok Islam selain FPI, selama kelompok tersebut masih meyakini *Syahadatain*, dan tidak mempunyai nabi baru, maka masih dianggap sebagai bagian umat Islam. Ahmadiyah dianggap bukan

sebagai umat Islam sehingga, jika ingin diakui eksistensinya, maka tidak boleh menanggapi dirinya sebagai bagian dari Islam, tapi harus memproklamkan dirinya sebagai bukan Islam barulah akan diterima oleh FPI. Adapun Syiah menjadi fenomena tersendiri. Ustadz Didit mengakui Syiah ada juga yang masih tergolong sebagai kelompok yang benar, seperti yang di Yaman, namun Syiah di Indonesia umumnya adalah Syiah Rafidhah atau Syiah yang sesat. Selama aktivitasnya senyap, FPI tidak akan mengambil tindakan, namun jika mulai melakukan aktivitas yang terang-terangan, tindakan tegas akan diambil terhadap mereka. FPI mengakui sebagai golongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dan, meski punya hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok Islam yang berhaluan salafi/wahabi, namun dalam beberapa hal berbeda pandangan, seperti sikap kelompok salafi/wahabi terhadap beberapa tradisi Islam seperti membaca barzanji dan perayaan maulid yang, oleh salafi dicap bid'ah, namun FPI tidak.

Priktek Kerukunan

Secara umum, priktek toleransi beragama yang dilakukan oleh umat Islam di Kota Samarinda ada dua kelompok. Kelompok moderat yang dimotori FKUB, MUI, dan NU bahkan sampai pada tingkat menghadiri perayaan-perayaan hari-hari besar agama-agama non muslim. Misalnya, peneliti mengamati hal tersebut saat mengikuti perayaan Imlek dan Perayaan Nyepi di kawasan Pura di kota Samarinda yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama di Samarinda. Kelompok lainnya, kelompok Islam puritan, seperti kelompok salafi dan FPI, tidak terlibat dalam kegiatan perayaan tersebut. Meskipun demikian, di kota Samarinda, terlihat baik kelompok salafi

maupun FPI tidak pernah melakukan tindakan main hakim sendiri jika ada hal-hal semacam pembangunan tempat ibadah non muslim yang ilegal, namun melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak keamanan. Berbeda dengan orang non muslim, kelompok salafi justru lebih keras terhadap kelompok Islam yang dianggap sesat, seperti Syiah. Meskipun, sejauh ini, di Samarinda belum pernah muncul kasus-kasus yang melibatkan bentrokan antara kelompok salafi dan kelompok Syiah. Tindakan intoleransi tersebut masih sebatas pada taraf pernyataan, belum menjurus pada aksi kekerasan. Hal ini tampaknya berbeda dengan kelompok FPI di beberapa daerah, misalnya, yang berbasis di Pulau Jawa, dimana sering muncul laporan-laporan menyangkut aksi-aksi anarkis FPI terhadap kelompok minoritas. Di Samarinda, FPI setempat pernah membantu seorang warga non muslim yang tengah bersengketa dengan warga muslim memenangkan sengketa terkait kepemilikan suatu bangunan karena, setelah diteliti berdasarkan bukti hukum yang sah, FPI berkesimpulan bahwa warga non muslim lah sebagai pemilik sah bangunan tersebut.

Perspektif Kerukunan kelompok Islam di Samarinda dalam Konteks Sosial, Politik, dan Budaya.

Tak dapat dipungkiri, berbagai isu dan peristiwa menyangkut relasi dan kerukunan umat beragama tentu pula memiliki sejumlah latar belakang, baik sosial, politik, maupun budaya. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa kelompok FPI, yang di media massa dikenal memiliki *trackrecord* sering melakukan tindakan intoleransi hingga yang anarkis, namun di wilayah Kaltim, FPI belum pernah melakukan tindakan-tindakan seperti sweeping, penyerangan kelompok minoritas,

maupun penyegelan tempat ibadah yang dianggap bermasalah. Salah satu hal yang melatarbelakangi adalah pihak keamanan di wilayah kaltim yang bergerak cepat untuk meredam gejala-gejala yang dapat menyulut konflik. Hal ini terlihat baik seperti dalam kasus pembangunan suatu rumah ibadah yang “dipermasalahan” oleh warga setempat di Samarinda maupun di saat adanya demo kontra FPI. Selain itu, wilayah Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang secara historis merupakan rumah bagi warga suku Dayak yang umumnya beragama Kristen, namun secara komposisi jumlahnya masih kalah dibandingkan dengan para pendatang. Meski tidak dapat dipungkiri ada pula warga pribumi Kalimantan yang muslim, seperti Kutai dan Banjar. Beberapa forum-forum kerukunan yang ada di kota Samarinda merefleksikan upaya-upaya yang dilakukan dengan baik dalam mengintegrasikan elemen-elemen golongan baik agama maupun etnis. Namun politik identitas etnis dayak/Kristen dan non Dayak/muslim ini juga di sisi lain memperlihatkan adanya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, seperti demo kontra FPI yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pancasila yang diikuti oleh sejumlah warga yang mengenakan atribut dayak. Namun, pengalaman tragis konflik yang pernah melanda Kalimantan beberapa waktu lalu, seperti Tragedi Sambas dan Sampit, nampak masih memberikan rambu-rambu bagi kelompok-kelompok untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengulang kemunculan tragedi serupa.

PENUTUP

Perspektif kerukunan beragama kelompok Islam salafi di Kota Samarindamasihbersifat konservatif, masih mengandung batasan-batasan yang ketat, dan

cenderung menghindari interaksi-interaksi yang bersifat keagamaan dengan warga non muslim. Namun, reaksi lebih keras justru diarahkan kepada kelompok Islam Syiah, yang dianggap lebih berbahaya daripada kelompok non muslim. Praktek kerukunan kelompok Islam, kelompok Islam moderat bahkan sudah terlibat dalam perayaan hari besar agama non Islam. Sementara, kelompok Islam salafi/konservatif menghindari interaksi-interaksi keagamaan dengan kelompok non muslim.

Perspektif Kerukunan kelompok Islam di Samarinda, Kaltim dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Antara lain adalah responsivitas aparat keamanan dalam meredam potensi konflik, relasi/komposisi warga pribumi (dayak/kristen) dengan warga muslim (baik pendatang maupun pribumi (Kutai/Banjar), maupun kesadaran untuk tidak mengulangi tragedi berdarah masa lalu yang pernah terjadi di Sambas (Kalbar) dan Sampit (Kalteng).

Sejauh ini, kelompok Islam salafi belum terlibat dalam forum-forum kerukunan seperti FKUB. Untuk itu, pihak kemenag, khususnya FKUB perlu mengundang tokoh-tokoh kelompok tersebut (salafi/FPI) untuk berdialog di forum-forum FKUB dan forum kebangsaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eck, Diana L. 2007. "Prospects for Pluralism: Voice and Vision in the Study of Religion. Presidential Address of the American Academy of Religion, 2006". *Journal of The American Academy of Religion*, 75 (4), h.1-34.
- Halili, & Naipospos. Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2014. Jakarta: Wahid Institute, 2015.

Kymlica, Will. 2003, *Kewargaan Multikultural; Teori Liberal Mengenai Hak-hak Liberal*. Jakarta: LP3S

Laporan Penelitian Litbang Agama Makassar. 2011. *Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara*. Litbang Agama Makassar

.....
2012. *Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Timur*. Litbang Agama Makassar

.....
..... 2013. *Indeks Kerukunan Umat Beragama di Gorontalo dan Sulawesi Barat*. Litbang Agama Makassar

.....
2016. *Radikalisme Kaum Muda Terdidik di Makassar*. Litbang Agama Makassar

.....
2017. *Dinamika Aliran-aliran dalam Islam di Kota Makassar*. Litbang Agama Makassar.

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014. Jakarta: Wahid Institute.

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2016. Jakarta: Wahid Institute.

Lochhead, David. 1988, *The Dialogical Imperative: A Christian Reflection on Interfaith Encounter*. Oregon: Orbits Book

Masduqi, Irwan. 2011, *Berislam Secara Toleran*. Bandung : Mizan.

Hatta, Mawardi. 1981. *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Misrawi, Zuhaeri. 2010, *Pandangan Muslim Moderat; Toleransi, Terorisme dan*

- Oase Perdamaian*. Jakarta : Kompas
- Oesman, Mohamed Fathi. 2012, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*. Jakarta: Democracy Project
- Robet, Robertus & Hendrik Boli Tobi. 2014, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan; Dari Marx sampai Agamben*. Jakarta: Margin Kiri.
- Sambullah, Umi. 2015, *Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Elit Agama di Kota Malang*. Analisa Journal of Social Science and Religion Volume 22 No. 01, Juni.
- Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah (Tasikmalaya, Yogyakarta, Bojonegoro, dan Kupang)*. Jakarta: INFID, Juni 2016.
- Sukidi. 2001. *Teologi Inklusif Cak Nur*. Kompas : Jakarta.
- Suryana, Toto. 2011. "Aktualisasi Kerukunan Beragama". *Jurnal Pendidikan IslamTa'lim* Vol.9.No.2
- Suseno, Frans Magnis. 2005. "Pluralisme dalam Sengketa". *Makalah*. Disampaikan dalam seminar Tafsir Aktual atas Pluralisme. 12 Oktober 2005.
- Syamsurijal. 2012. "Sisi Gelap Toleransi Beragama di Sulawesi Utara: Menyingkap Problem Kerukunan Beragama di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu". *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, h.66-73.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. Yale University Press : New Haven and London